

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. KH. MANSYUR NO. 71
TELP. (0328) 662635 FAX. 662635
2016-2021

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr Wb,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Diskominfo Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugasnya di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Diskominfo Kabupaten Sumenep.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Sumenep, Juni 2016

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sumenep

Drs.YAYAK NURWAHYUDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman :
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo.....	8
2.2 Sumber Daya Diskominfo	9
2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo.....	15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ...	21
3.3 Telaahan Renstra Diskominfo Kabupaten Sumenep	28
3.4 Telaahaan RT/RW dan kajian lingkungan hidup strategis	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo	34
4.2 Strategi dan Kebijakan	36
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	42
BAB VII PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan mengacu pada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra SKPD) Tahun 2016 – 2021, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Renstra Dinas Kominfo) Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021, adalah dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep setiap tahun. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran III tentang Penyusunan RPJM;
9. PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Penyusunan Renstra SKPD;
10. PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran VI tentang Penyusunan Renja SKPD;
11. PERMENDAGRI Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, adalah :

- a. Memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep untuk 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Sebagai pedoman dan arah bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan;
- c. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep dalam melakukan koordinasi eksternal dengan **stakeholder** terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, selama periode 2016 s/d 2021.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, adalah :

- a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sumenep secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kerja;
- c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;
- e. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien;
- f. Memberikan gambaran pencapaian keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan secara terukur melalui indikator kinerja dari berbagai program yang telah direncanakan selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menjelaskan capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan Renstra SKPD pada periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas tantangan dan peluang yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD periode 2016-2021.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menguraikan telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisikan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Sumenep.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan inidikatif.

Bab VI Indikator Kinerja yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumenep

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

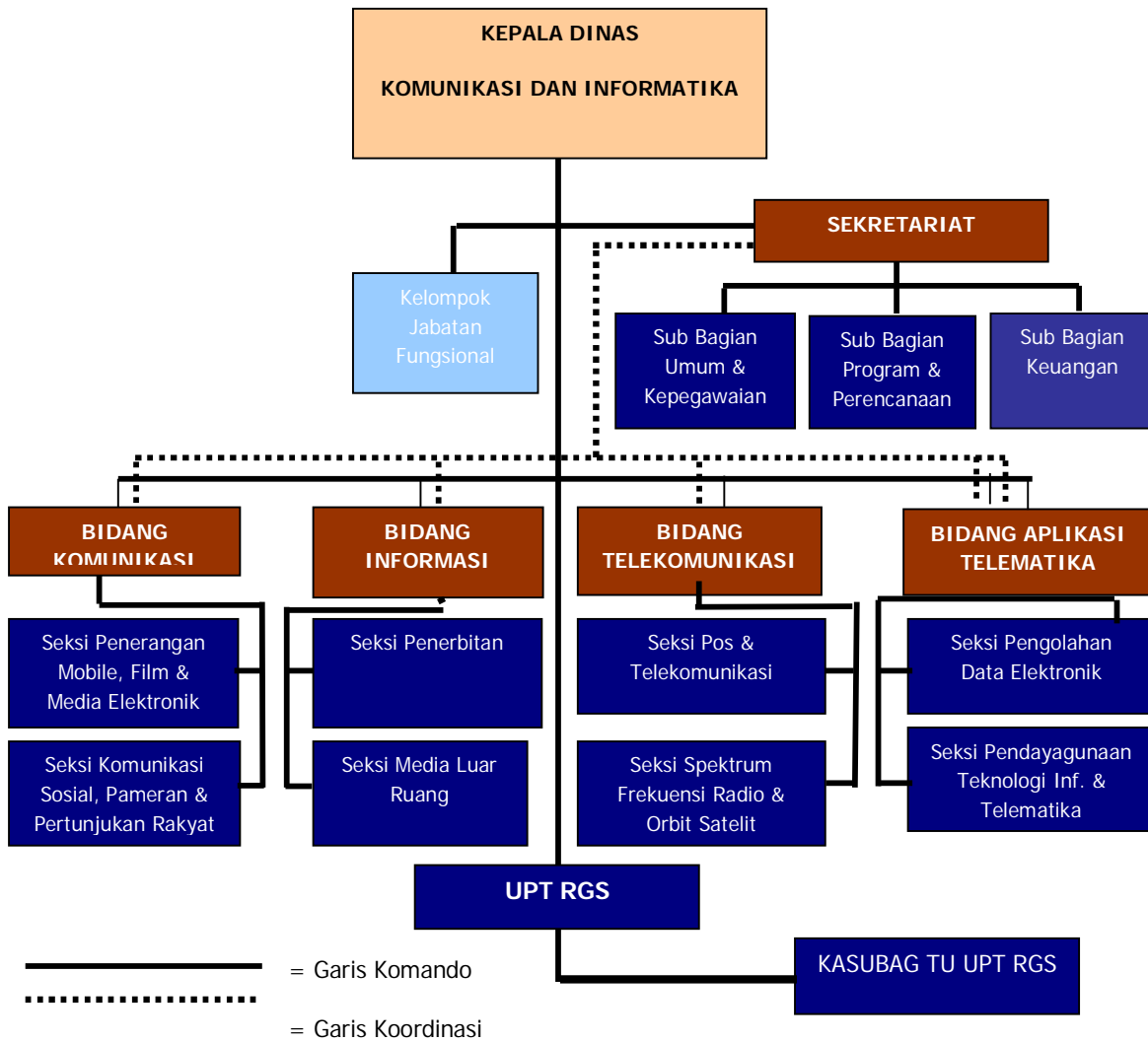
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Komunikasi dan Informatika.

2.1.2 FUNGSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika;
2. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan komunikasi;
3. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan informasi;
4. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan telekomunikasi;
5. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan aplikasi telematika;
6. pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pelayanan komunikasi dan informasi;
7. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan insan pers, media cetak dan media elektronik dalam memperluas jaringan informasi;
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan komunikasi dan informasi;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kebijakan umum pembangunan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang difokuskan untuk mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera.

Hal ini suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Sumenep. Untuk mendukung kebijakan tersebut,

Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang kuat dan profesional, serta penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memadai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yang terletak di desa Pabian atau tepatnya di Jl. KH. Mansur No. 71 Sumenep kode pos 694111 telp. (0328) 662935 fax. (0328) 663984. Pada tahun 2016, memiliki 81 karyawan dengan rincian PNS sebanyak 78 orang dan 3 orang PTT terdiri dari **Laki – Laki 61** Orang dan **Perempuan 20** Orang.

Jumlah Karyawan	Eselon	Kepangkatan	Pendidikan	Umur
1	II	IV/c	S2	50
5	III	IV/b	S2	47 - 51
11	IV	III/d	SMA	48 - 56
61	STAF	I/b, II/b, III/a,b,c,d	SD - SMA	35 - 57
3	PTT	-	SLB	30 - 45

Dilihat dari latar belakang pendidikannya 1% S3 11% S2, 10% S1, 2% D3, 70% SLTA, 2% SMP/SLTP dan 5% SD.

Dilihat dari kualitas sumber daya aparatur yang ada, dengan latar belakang pendidikan SLTA adalah paling besar yaitu 70 %, kondisi ini menunjukkan kurangnya sumber daya aparatur tenaga ahli berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai sebanyak 78 orang, dirasa masih kurang memadai dibandingkan dengan volume beban kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sarana dan prasarana, baik berupa gedung kantor, peralatan dan kendaraan dinas serta peralatan/perengkapan kantor lainnya. Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berupa gedung dan bangunan pendukung serta sarana pendukung untuk operasional. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3
Daftar Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Gedung Kantor	2 unit	Baik	
2.	Mobil Kepala Dinas Dan Operasional	9 unit	Baik	
3.	Kendaraan Operasional	32 unit	Baik	
4.	Mesin Genset	4 unit	Baik	
5.	Mobil Film M-PLIK	1 unit	Baik	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah	3	Ada
2	PERALATAN DAN MESIN		
	A. alat - alat Berat	4	Baik
	B. Alat - Alat Angkutan	46	Baik

	C. Alat - alat Bengkel dan alat ukur	4	Baik
	D. Alat -alat kantor dan Rumah Tangga	2210	Baik
	E. Alat -alat Studio dan Komunikasi	393	Baik
5	ASET TETAP LAINNYA		
	Buku Perpustakaan	120	Baik

Tabel II.4
Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3 .1 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menjelaskan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Kabupaten Sumenep berdasarkan sasaran / target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diklarifikasi oleh Pemerintah.

Dengan mempedomani Permendagri Nomor 34 Tahun 2010 dan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2011 - 2015 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan kinerja masing-masing SKPD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Capaian kinerja untuk masing-masing indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

**Indikator Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep
Tahun 2011-2015**

No.	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	1. Jumlah jaringan komunikasi 2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 3. Jumlah surat kabar nasional/lokal 4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Rasio pengawasan dan pengendalian	94 8 54 27	85 8 54 27	86 7 54 27	97 8 85 30	100 8 85 30
	Website milik pemerintah daerah	Persentase web milik daerah	100	100	100	100	100

2.3.2 Kinerja keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 :

NO	Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
			(Rp)	
A	BELANJA DAERAH	8.081.500.337	8.081.500.337	100
B	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.263.404.855	4.946.038.261	93,97
1	Belanja Pegawai	5.263.404.855	4.949.038.261	94,027
2	Gaji dan Tunjangan	4.907.004.855	4.589.638.261	93,532
3	Tambahan Penghasilan PNS	356.400.000	256.400.000	71,942
A	BELANJA LANGSUNG	2.818.095.482	4.946.038.261	93,97
A.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.575.000	1.575.000	100

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	179.400.000	171.774.181	95,749
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	82.615.000	76.596.300	92,715
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.487.000	20.487.000	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.347.000	20.347.000	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.852.000	13.852.000	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.557.400	12.557.400	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.282.000	15.282.000	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.100.000	13.100.000	100
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	38.045.300	38.045.300	100
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	24.450.000	24.450.000	100
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasanana Aparatur			
1	Pengadaan Komputer	20.813.000	20.811.000	99,99
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	130.619.707	130.619.707	100
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	18.775.700	18.775.700	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	23.400.000	23.400.000	100
5	Pemeliharaan Rutin Jaringan Air, Listrik dan Telepon	26.800.000	26.750.000	99,813
6	Rehabilitasi Gedung Kantor	191.284.500	191.034.500	99,869
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			

1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	50.696.100	50.687.100	99,982
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	39.759.550	39.647.050	99,717
E	Program Pengembangan Komuniasi, Informasi dan Media Massa			
1	Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyajian Informasi	43.630.800	43.080.800	98,739
2	Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi dengan Media	134.955.000	134.955.000	100
3	Pengembangan Telecenter	142.051.700	141.594.200	99,678
4	Peningkatan Kinerja PDE dan Jaringan G-Online	117.191.400	117.191.400	100
5	Penyediaan Jasa Komunikasi Internet	327.550.000	327.550.000	100
6	Pengembangan Web	38.850.000	38.850.000	100
7	Pembangunan Sarana Pendukung Informasi kepulauan	50.609.100	50.434.100	99,654
8	Sambung Rasa Bersama Wong Cilik			
9	Pengembangan Jaringan G-Online	182.999.700	182.999.700	100
F	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			
1	Workshop Pengembangan Iptek	30.000.000	30.000.000	100
2	Lomba Cerdik Cermat KIM (LCCK)	8.234.400	8.234.400	100

G	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa			
1	Penerbitan Tabloid	216.049.700	216.592.200	100,25
2	Penyebarluasan Informasi melalui Pameran dan Pertura	-	-	
3	Penyebarluasan Informasi melalui Media Elektronik	75.213.750	75.204.000	99,987
4	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Siaran Radio	38.614.300	38.614.300	100
5	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Peningkatan Kinerja News Room	76.691.300	76.691.300	100
6	Penyebarluasan Informasi melalui Penyelenggaraan Penerangan Mobile	13.344.800	13.343.400	99,99
7	Penyebarluasan Informasi melalui Peningkatan Kinerja Kehumasan dan Komunikasi Sosial	-	-	
8	Penyebarluasan Informasi melalui Pariwara dan Adventorial Media Cetak	106.102.975	106.102.750	100
9	Penyebarluasan Informasi melalui Pentas Hiburan dan Informasi	30.020.000	29.570.000	98,501
10	Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang	60.000.000	59.999.900	100
11	Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Perundang-undangan tentang Tower Telekomunikasi Terpadu	6.351.600	6.351.600	100
12	Survey dan Pengawasan Menara (Tower) Telekomunikasi	25.925.300	259.215.730	999,86
13	Pembinaan dan Pendataan Wartel, Warnet dan Jasa Pos	19.499.400	18.871.290	96,779
14	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	15.248.600	15.248.600	100
15	Penyebarluasan Informasi melalui Pameran			100

	Pembangunan	29.000.000	29.000.000	
16	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran	16.921.400	16.920.920	99,997
17	Peningkatan Kinerja PPID	89.180.100	89.183.100	100

Realisasi kinerja dan PAD tahun 2015

No	Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi 2015	
			Rp.	%
I	Pendapatan Asli Daerah	40.000.000	37.313.791	93,03
II	Belanja Langsung	2.818.095.482	2.801.890.828	99,42
III	Belanja Tidak Langsung	5.263.404.855	4.946.038.261	93,97

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode tahun 2016 - 2021 memiliki tantangan untuk membantu Bupati Sumenep dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pembangunan Komunikasi dan Informasi Daerah, untuk dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta pemerintah dalam mewujudkan Komunikasi dan Informasi Daerah harus kami tingkatkan. Selain itu untuk pengembangan pelayanan Komunikasi dan Informasi Daerah terhadap kebijakan umum pembangunan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang difokuskan untuk mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera dalam pembangunan masyarakat perdesaan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2016 – 2021 antara lain :

1. *Satu data untuk Pembangunan Sumenep.*

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

2. *Layanan Pemerintahan berbasis (TIK) atau layanan Online (G-On Line).*

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Sumenep akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misal, perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

3. *Manajemen Perkantoran yang paperless.*

Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat mengurangi penggunaan/ konsumsi kertas dan menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja.

4. *Implementasi menara bersama di Kabupaten Sumenep*

Implementasi menara eksisting sebagai menara bersama memungkinkan untuk merencanakan, mengendalikan dan menata pertumbuhan menara di Kabupaten Sumenep hingga menjadi 250 zona persebaran (untuk lima tahun kedepan hingga 2021), dengan asumsi minimal 1 menara telekomunikasi digunakan oleh minimal 5 BTS.

5. *Tuntutan publik akan Keterbukaan Informasi publik dan transparansi.*

Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat senantiasa berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya.

6. *Tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata.*

Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.

7. *Tumbuh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat.*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi begitu pesat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa akses yang kurang baik bagi masyarakat.

8. *Tingkat apresiasi publik terhadap pembangunan daerah yang begitu besar.*

Tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin menggema, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya.

9. *Adanya harapan dan kebutuhan yang besar terhadap dukungan Sistem Informasi dan Telematika (SITEL) untuk meningkatkan kinerja manajemen aparatur.* Keberadaan SITEL pada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan fungsi aparatur serta meningkatkan aspek transparansi aparatur sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

10. *Terbatasnya kapasitas, jangkauan, kualitas sarana dan prasarana telematika.*

3.2 Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Bupati Sumenep terpilih periode Tahun 2016-2021, mempunyai Visi

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Di dalam visi tersebut terdapat 8 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

Sumenep Makin Sejahtera di sini memiliki dua makna :

Pertama, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (*resources*) alam yang melimpah dan kaya khazanah Kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (*home industri*) lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) Masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok Manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai. Bagi Masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi *trend* terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang terkelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA.

Kedua, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (*meaning*) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman *glamourisme* dan pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi Budaya maupun perkembangan perubahan Masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

Pemerintahan Bersih adalah sebuah ikhtiar untuk mewujudkan sikap dan perilaku aparaturnya yang tidak terkontaminasi praktik-praktik korupsi, yang bisa mengganggu kelancaran dan kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan yang Mantap terarah.

1. **Mandiri** adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa Masyarakat Sumenep yang didukung *stakeholders* pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak tersubordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*).
2. **Agamis** di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan *output* pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk Masyarakat Sumenep ber-*akhlaqul karimah*. Dengan kata lain apabila konsep Agama dijadikan modal/*spirit* dalam berkehidupan Masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta Masyarakat yang memiliki nilai-moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa
3. **Nasionalis** adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri Masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. **Transparan** atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government*). *Good Governance* di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan Warga Negara (*citizen*) kepada Masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan Masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model

pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (*accountable*), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.

5. **Adil** adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir „ketimpangan“ distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif *fifty-fifty*, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar kebutuhan (*need assesment*) Masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan „manis“nya pembangunan untuk kesejahteraan Masyarakat Sumenep.
6. **Profesional** bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan *skill* dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional di sini tidaklah berarti mendatangkan „orang luar“ (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi Masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.

Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Misi Kedua, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.

Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.

Misi Ketiga, **Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.**

Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Kemandirian tersebut tentunya dengan tidak meninggalkan kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan. Beragamnya potensi ekonomi Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausahamuda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan.

Misi Keempat, **Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan *Accountable*.**

Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh *stakeholder* baik dari aparatur pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, Pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel.

Keberhasilan Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

Misi Kelima, **Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta *Stakeholder* Dalam Proses Pembangunan.**

Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Misi Keenam, **Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.**

Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Di samping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh

karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

3.3 Telaahaan Renstra SKPD

Renstra SKPD untuk urusan minset sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sehubungan dengan telah berakhirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten sumenep tahun 2011-2015, maka berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka harus disusun dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itu sejalan dengan penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Lima Tahunan yang berupa Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk peride tahun 2016-2021 yang isinya menjabarkan Visi.Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun.

Untuk mencapai visi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dirumuskan misi sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui Misi ini, akan memberikan arahan jangka panjang dalam administrasi pemerintahan sebagai acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Untuk maksud tersebut telah dirumuskan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut:

- B.1 Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi;
- B.2 Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi;
- B.3 Mengembangkan kerja sama informasi dengan media massa;
- B.4 Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

3.4 Telaahaan RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sumenep “SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional” sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada dinas komunikasi dan informatika adalah di misi yang ke empat (4) sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi 4 adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b. Mewujudkan kultur dan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel;

Tujuan pembangunan di atas kemudian perlu dijelaskan kedalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Keterkaitan Daratan dan kepulauan antara lain :

- Kepulauan sangat lambat akan informasi
- Selama ini Kepulauan sangat tertinggal
- Untuk itu perlu percepatan jaringan Internet lewat TIK
- Sejalan dengan semua tersebut maka Diskominfo berusaha untuk mendekatkan daratan dan kepulauan dengan tehnologi Internet (IT)

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2016 – 2021 antara lain:

Satu data untuk Pembangunan Sumenep. Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

1. Layanan Pemerintahan berbasis (TIK) atau layanan Online (G-On Line).

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Sumenep akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misal, perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

2. Manajemen Perkantoran yang paperless.

Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat mengurangi penggunaan/ konsumsi kertas dan menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja.

3. Implementasi menara bersama di Kabupaten Sumenep

Implementasi menara eksisting sebagai menara bersama memungkinkan untuk merencanakan, mengendalikan dan menata pertumbuhan menara di Kabupaten Sumenep hingga menjadi 196 zona persebaran (untuk lima tahun kedepan hingga 2019), dengan asumsi minimal 1 menara telekomunikasi digunakan oleh minimal 3 BTS.

4. Tuntutan publik akan Keterbukaan Informasi dan transparansi.

Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat senantiasa berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya.

5. Tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata.
Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.
6. Tumbuh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi begitu pesat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa eksese yang kurang baik bagi masyarakat.
7. Tingkat apresiasi publik terhadap pembangunan daerah yang begitu besar.
Tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin menggema, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya.
8. Adanya harapan dan kebutuhan yang besar terhadap dukungan Sistem Informasi dan Telematika (SITEL) untuk meningkatkan kinerja manajemen aparatur. Keberadaan SITEL pada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisienkan fungsi aparatur serta meningkatkan aspek transparansi aparatur sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan.
9. Terbatasnya kapasitas, jangkauan, kualitas sarana dan prasarana telematika.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka menjamin efektivitas implementasi visi - misi pembangunan daerah dalam bentuk program dan kegiatan yang tepat, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumenep yang ditetapkan di sini sudah barang tentu sepenuhnya mengacu pada visi - misi pembangunan daerah yang sekaligus merupakan janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Secara lebih rinci, apa tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan landasan dan arahan bagi penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang ada di Kabupaten Sumenep;
2. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam perjalanan setiap langkah dan tahapan Pembangunan Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pos dan Telekomunikasi;

4.2 Strategi Dan Kebijakan

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, Diskominfo menentukan Visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 tahun kedepan 2016-2021. Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Visi Kabupaten Sumenep :

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 4: Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mewujudka kultur dan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima 2. Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan dan kualitas layanan kependudukan 1. Peningkatan disiplin tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel 2. Tersedianya aparatur pemerintahan daerah yang memadai dan kompeten dan didukung OPD sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik 4. Optimalisasi kapasistas dan kemandirian fiskal daerah yang transparan, akuntabel dan auditabel 5. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan 6. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi Kominfo Kabupaten Sumenep , strategi dan kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan maka strategi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Misi ke IV Bupati Sumenep yakni :

Sasaran		Strategi	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju kepada pelayanan prima	1	Meningkatkan pelayanan yg efektif dan efisien dalam rangka reformasi birokrasi
2	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan meningkatnya kualitas layanan kependudukan	2	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
1	Peningkatan disiplin tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel
2	Tersedianya aparatur pemerintahan daerah yang memadai dan kompeten dan didukung OPD sesuai kebutuhan	1	Memperluas kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kapasitasnya yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi
3	Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik	1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
4	Optimalisasi kapasistas dan kemandirian fiskal daerah yang transparan, akuntabel dan auditabel .	1	Pengelolaan sumber-sumber keuangan dan asset daerah secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi

		2	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui monitoring, evaluasi, transparansi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan APBD
5	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	1	Mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang didukung dengan perencanaan penganggaran secara sistematis dan terpadu berbasis kepentingan masyarakat
6	Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa	1	Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Diskominfo Kabupaten Sumenep dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Diskominfo kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Sumenep. Tabel Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. (terlampir).

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penyediaan jasa surat menyurat2) Materai3) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4) Rekening Telepon & Fax5) Rekening Air6) Rekening Listrik7) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional8) Pemeliharaan Kendaraan9) Perizinan Kendaraan10) Penyediaan jasa kebersihan kantor11) Alat, Bahan, dan Jasa Kebersihan12) Penyediaan alat tulis kantor13) Alat Tulis Kantor14) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan15) Foto copy dan penggandaan16) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor17) Komponen Listrik18) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Koran, Tabloid, dan Majalah19) Penyediaan makanan dan minuman Snack dan Nasi Kotak20) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah21) Perjalanan Dinas dan BBM22) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah23) Perjalanan Dinas dan BBM
<p>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</p>

- 1) Pengadaan Kendaraan dinas / operasional
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Pengadaan Komputer
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala Komputer
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi
- 9) Pemeliharaan Rutin Jaringan Air, Listrik dan Telphon
- 10) Rehabilitasi Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan Pakian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Diklat teknis dan Pengadaan Barang
- 3) Belanja Hibah kepada Komisi Informasi (KI)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan laporan SKPD

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyajian Informasi
- 2) Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi dengan Media
- 3) Pengembangan Telecenter
- 4) Peningkatan Kinerja PDE dan Jaringan G-Online
- 5) Penyediaan Jasa Komunikasi Internet
- 6) Pengembangan Web
- 7) Pembangunan Sarana Pendukung Informasi Kepulauan
- 8) Sambung Rasa Bersama Wong Cilik
- 9) Pengembangan Jaringan G-Online
- 10) Pengembangan Desa Dering

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

<ol style="list-style-type: none"> 1) Kursus Pengelolaan G - Online 2) Bimbingan Teknis Web Sekolah 3) Bimbingan Teknis Internet 4) Bimbingan Teknis Komputer 5) Workshop Pengembangan Iptek 6) Lomba Cerdik Cermat KIM (LCCK)
<p>Program kerjasama informasi dan media massa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan Tabloid 2) Penyebarluasan Informasi melalui Pameran dan Pertura 3) Penyebarluasan Informasi melalui Media Elektronik 4) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Siaran Radio 5) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Peningkatan Kinerja News Room 6) Penyebarluasan Informasi melalui Penyelenggaraan Penerangan Mobile 7) Penyebarluasan Informasi melalui Peningkatan Kinerja Kehumasan dan Komunikasi Sosial 8) Penyebarluasan Informasi Melalui Pariwara dan Adventorial Media Cetak 9) Penyebarluasan Informasi Melalui Pentas Hiburan dan Informasi 10) Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang 11) Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Tower Telekomunikasi Terpadu 12) Survey dan Pengawasan Menara (Tower) Telekomunikasi 13) Pembinaan dan Pendataan Wartel, Warnet dan Jasa Post 14) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 15) Penyebaran Informasi Melalui Pameran Pembangunan 16) Pameran Pekan KIM 17) Pembinaan & Pengawasan Lembaga Penyiaran 18) Peningkatan Kinerja PPID 19) Publikasi Pembangunan Sumenep kerjasama dengan Televisi Lokal

Indikatif SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR sasaran	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN									
				2017 Target	(Rp) Juta	2018 Target	(Rp) Juta	2019 Target	(Rp) Juta	2020 Target	(Rp) Juta	2021 Target	(Rp) Juta
Mengembangkan	▪ Meningkatkan	▪ Frekwensi	Program Kerjasama	27.000	268.800.000	270.200	275.000.000	270.200	275.000.000	270.300	275.000.000	270.350	275.000.000
Kerja sama	Ketersediaan	Penyebaran	Informasi dan Media Masa	25	57.631.000	26	70.000.000	27	70.000.000	28	70.000.000	29	70.000.000
Media dalam	Akses informasi	Informasi		5	39.262.000	7	50.000.000	9	50.000.000	11	50.000.000	12	50.000.000
Rangka mendukung	Bagi seluruh			12	153.580.000	13	175.000.000	14	175.000.000	15	175.000.000	16	175.000.000
Penyebarluasan	Lapisan masyarakat			6	54.817.800	8	75.000.000	10	75.000.000	12	75.000.000	14	75.000.000
Informasi	▪ Meningkatkan			9	10.125.000	10	25.000.000	11	25.000.000	12	25.000.000	13	25.000.000
Kepada masyarakat	Transaksi data			2	35.363.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	4	50.000.000
	Dan informasi												
	Melalui jaringan												
	TI dan sistem												
	informasi												
	▪ Meningkatkan												
	Keharmonisan												
	Antara media massa,												
	masyarakat dan Pemkab Sumenep												
		▪ Peningkatan	Program Pengembangan	Tiap Hari	73.262.050	Tiap Hari	100.000.000	Tiap Hari	100.000.000	Tiap Hari	100.000.000	Tiap Hari	100.000.000
		Ketersediaan	Komunikasi dan Media Massa	Tiap Hari	29.999.966	Tiap hari	50.000.000	Tiap hari	50.000.000	Tiap hari	50.000.000	Tiap hari	50.000.000
		Informasi yang		35	57.731.800	36	60.000.000	40	60.000.000	45	60.000.000	50	60.000.000
		Berkualitas		Tiap hari	61.494.000	Tiap hari	75.000.000	Tiap hari	100.000.000	Tiap hari	100.000.000	Tiap hari	100.000.000
		▪ Meningkatnya	Program Fasilitasi	70	30.946.000	70	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000

			Peningkatan SDM										
		Kemampuan SDM	Bidang Komunikasi dan Informasi	70	41.433.000	70	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	100	50.000.000
		bidang IPTEK		40	25.768.000	50	50.000.000	60	50.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000
		▪ Meningkatnya Pemanfaatan server		40	30.000.000	45	50.000.000	50	50.000.000	55	50.000.000	65	50.000.000
				6	54.764.500	8	50.000.000	10	50.000.000	12	50.000.000	14	50.000.000
		▪ Meningkatnya Pengawasan dan pengendalian :		5%	7.010.000	5%	25.000.000	6%	25.000.000	6%	25.000.000	10%	25.000.000
				5%	67.270.000	10%	100.000.000	12%	100.000.000	12%	100.000.000	15%	100.000.000
				1%	7.010.000	2%	25.000.000	2%	25.000.000	2%	25.000.000	3%	25.000.000
				6	126.140.000	8	50.000.000	10	50.000.000	12	50.000.000	14	50.000.000
				2	20.600.000	2	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000
				5	14.020.000	5	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	8	50.000.000
				25	260.784.000	25	300.000.000	28	300.000.000	30	300.000.000	35	300.000.000
				2	11.075.000	2	25.000.000	2	25.000.000	3	25.000.000	4	25.000.000
				Tiap hari	54.764.500	Tiap hari	50.000.000	Tiap hari	50.000.000	Tiap hari	50.000.000	Tiap hari	50.000.000

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Sumenep sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021. Berikut indikator kinerja Diskominfo.

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO KABUPATEN SUMENEP MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan dan penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam manajemen pemerintahan :							
	Pengembangan Web dan Maintenance Website		20	25	30	35	40	16
	Penyediaan jaringan dan jasa komunikasi internet	1	1	1	1	1	1	1
	bimbingan teknis internet	10	15	20	25	30	40	40

2	Pengembangan kerja sama dalam penyebaran informasi secara objektif dan bertanggung jawab:							
	Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan media massa	12	12	12	12	12	12	12
	Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan penyajian informasi	30	36	36	40	40	40	40
	Penerbitan tabloid	27000	27250	27300	27350	27400	27450	9000
	Penyebarluasan informasi melalui pameran dan pertura	4	6	8	10	12	14	3
	Penyebarluasan informasi melalui media elektronik	24	25	27	28	28	30	20
	Penyebarluasan inf. Penyelenggaraan pemda melalui	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari

	siaran radio							
	penyebarluasan inf. Pemb.daerah melalui peningkatan kinerja news room	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari
	penyebarluasan informasi melalui penyelenggaraan penerangan mobile	25	35	40	45	55	60	25
	penyebarluasan informasi melalui pariwisata dan adventorial media cetak	25	35	40	45	55	60	20
	penyebarluasan informasi melalui pentas hiburan dan penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	25	35	40	45	55	60	20
3	Pengelolaan Informasidokumentasi :							
	Permohonan informasi (PPID)	5	10	15	20	25	30	2

BAB VII PENUTUP

1. Rencana Strategis (Renstra) DISKOMINFO Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi Bupati Sumenep.
2. Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, agar setiap bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dengan renstra ini diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergi program antar instansi/lembaga terkait dalam pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Sumenep.
4. Secara periodik Renstra pun akan dijadikan pedoman sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan renstra atau tidak, kemudian setiap tahun pun Renstra akan dikaji ulang dan direvisi sesuai dengan perkembangan yang ada apabila itu diperlukan dengan tidak merubah substansi Visi, isi dan tupoksi yang bersifat mendasar.